



**RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
DPPA SKPD**

PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS

Tahun Anggaran 2018

Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
Bidang Pemerintahan : 4 . 01 Administrasi Pemerintahan
Unit Organisasi : 4 . 01 . 08 KECAMATAN UNDAAN

RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
4	PENDAPATAN	3.120.000,00	3.120.000,00	0,00	0,00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	3.120.000,00	3.120.000,00	0,00	0,00
4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	3.120.000,00	3.120.000,00	0,00	0,00
5	BELANJA	4.053.034.000,00	4.104.699.000,00	51.665.000,00	1,27
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.937.534.000,00	2.989.199.000,00	51.665.000,00	1,76
5.1.1	Belanja Pegawai	2.937.534.000,00	2.989.199.000,00	51.665.000,00	1,76
5.2	BELANJA LANGSUNG	1.115.500.000,00	1.115.500.000,00	0,00	0,00
5.2.1	Belanja Pegawai	211.560.000,00	208.360.000,00	(3.200.000,00)	(1,51)
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	697.940.000,00	701.140.000,00	3.200.000,00	0,46
5.2.3	Belanja Modal	206.000.000,00	206.000.000,00	0,00	0,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(4.049.914.000,00)	(4.101.579.000,00)	(51.665.000,00)	1,28

RENCANA PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PERTRIWULAN

NO.	URAIAN	TRIWULAN					JUMLAH
		I	II	III	IV		
1	2	3	4	5	6	7	
1	Pendapatan	780.000,00	780.000,00	780.000,00	780.000,00	3.120.000,00	
2.1	Belanja Tidak Langsung	747.300.000,00	747.300.000,00	747.300.000,00	747.299.000,00	2.989.199.000,00	
2.2	Belanja Langsung	222.453.000,00	328.116.000,00	225.866.500,00	339.064.500,00	1.115.500.000,00	

CAMAT UNDAAN

Drs. RINARDI BUDIYANTO

NIP.19690325 198803 1 001

KUDUS, 6 November 2018

Menyetujui

SEKRETARIS DAERAH

SAM'ANI INTAKORIS, ST. MT.

NIP. 19690721 199703 1 005

Surat Pengesahan ini berlaku sebagai dasar pencairan dana bagi Kas Daerah. Tanggung Jawab terhadap penetapan dan perhitungan biaya serta penggunaan dana yang tertuang dalam DPPA -SKPD sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran.